

BAB 4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengantar

Untuk menjawab permasalahan dan hipotesis penelitian digunakan model ekonometri berupa model regresi. Model regresi tersebut digunakan untuk mengestimasi, pengaruh variabel-variabel dalam model dinamika Ibnu Khaldun terhadap tingkat kemiskinan

Dalam bab 3 telah diuraikan bahwa data yang digunakan adalah data panel, maka akan dianalisis dengan metode yaitu: *Pooled Least square* (PLS), efek tetap dan efek random. Setelah semua model dilakukan estimasi dengan masing-masing metode tersebut, selanjutnya dilakukan pemilihan metode yang terbaik untuk menghasilkan model yang tepat dengan uji tertentu. Dalam data panel, uji yang biasa digunakan adalah: uji Chow, Hausman dan uji LM.

4.2. Karakteristik Negara-Negara Muslim

Menurut klasifikasi Bank Dunia, negara-negara muslim tergolong kepada Negara berkembang. Menurut Bank Dunia negara berkembang adalah negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan rendah, menengah-bawah, dan menengah-atas.

Negara-negara berkembang pada umumnya memiliki berbagai masalah dan kesulitan yang sama, meskipun dalam kadar yang berbeda-beda. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang adalah kemiskinan absolute yang kronis dan meluas, tingkat pengangguran yang tinggi, jurang distribusi pendapatan yang semakin melebar, ancaman stagnasi dan rendahnya tingkat produktivitas di sektor pertanian, meningkatnya ketidakseimbangan taraf hidup, kurang memadainya pelayanan dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, semakin memburuknya kondisi neraca pembayaran dan terus membengkaknya hutang luar negeri, terus meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi dari luar negeri, serta semakin melemahnya struktur kelembagaan dan system tata nilai yang juga semakin terpengaruh oleh budaya luar.

Seraca singkat terdapat beberapa kesamaan diantara negara-negara berkembang. Ciri-ciri umum dari setiap Negara berkembang diklasifikasikan menjadi enam kategori utama, yaitu :

1. Standar hidup yang relative rendah, ditunjukkan oleh tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan yang parah, kondisi kesehatan yang buruk, dan kurang memadainya sistem pendidikan.

Standar hidup sebagian besar masyarakat dinegara-negara berkembang cenderung sangat rendah, tidak hanya dibandingkan dengan masyarakat dinegara-negara kaya, tetapi juga bila dibandingkan dengan masyarakat kaya dinegara itu sendiri. Standar hidup yang rendah dimanifestasikan dalam tingkat pendapatan yang sangat rendah, kemiskinan, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang rendah, peluang mendapatkan pekerjaan yang rendah, ketidakpuasan, dan ketidakberdayaan.

Tingkat Pertumbuhan Relatif Pendapatan Nasional dan Pendapatan per Kapita

Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional di negara-negara berkembang lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Negara-negara berkembang mengalami kemerosotan

pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam selama dekade 1980-an. GDP riil anjlok sebesar 0,2 persen pada tahun 1990 dan 1991 kemudian mengalami pertumbuhan kembali hingga lima tahun setelahnya.

**Tabel 4.1. Tingkat Pertumbuhan GNP riil Perkapita : Angka Persentase
Pertumbuhan Tahunan, Periode 1980-1990 dan 1990-2000**

| Negara | 1980-1990 | 1990-2000 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Afrika | | |
| Kenya | 0,3 | -0,3 |
| Nigeria | -3,0 | -0,4 |
| Tanzania | -0,7 | 0,3 |
| Uganda | 0,8 | 4,1 |
| Rep. Dem. Kongo (Zaire) | 1,5 | -8,3 |
| Asia | | |
| Bangladesh | 1,0 | 3,2 |
| India | 3,2 | 4,2 |
| Indonesia | 4,1 | 2,5 |
| Filipina | -1,5 | 1,0 |
| Korea Selatan | 8,9 | 4,7 |
| Sri Lanka | 2,4 | 4,0 |
| Amerika Latin | | |
| Brasil | 0,6 | 1,5 |
| Kolombia | 1,1 | 1,1 |
| Guatemala | -2,1 | 1,5 |

| | | |
|-----------|------|------|
| Meksiko | -0,9 | 1,5 |
| Peru | 0,2 | 3,0 |
| Venezuela | -2,0 | -0,5 |

Sumber : Todaro (2004)

Dekade 1980-an disebut sebagai “dekade yang hilang”, karena usaha-usaha pembangunan yang dijalankan negara-negara berkembang secara susah payah ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Pada kenyataannya selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, kesenjangan pendapatan antar negara kaya dan miskin semakin lebar dalam kecepatan yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi selama tiga dekade terakhir.

Jika kita meninjau tingkat pendapatan dari 20 persen penduduk dunia yang paling miskin, maka rasio pendapatan pada tahun 1960 adalah 30:1 (Artinya, pendapatan mereka yang terkaya 30 kali lipat lebih besar daripada pendapatan mereka yang paling miskin), pada tahun 1997 perbandingan ini berubah menjadi 70:1 (Artinya, pendapatan mereka yang paling kaya 70 kali lipat lebih besar daripada pendapatan penduduk dunia yang paling miskin).

Tabel 4.2. Ketimpangan Pendapatan Global antara 20 Persen Penduduk Dunia yang Terkaya dan yang Termiskin 1960-2000

| Tahun | Rasio Pembagian Pendapatan |
|-------|----------------------------|
| | Terkaya terhadap Termiskin |
| 1990 | 30 banding 1 |
| 1970 | 32 banding 1 |
| 1980 | 45 banding 1 |
| 1991 | 61 banding 1 |
| 2000 | 70 banding 1 |

Sumber : Todaro (2004)

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di negara berkembang sangatlah parah. Angka kemiskinan absolute yang dihadapi oleh negara-negara berkembang sangat bervariasi, begitu juga kemajuan dan kemunduran yang mereka alami dalam mengurangi kemiskinan.

Tabel 4.3. Kemiskinan Pendapatan Berdasarkan Wilayah, 1981-2001

(Juta)

| Wilayah | Penduduk yang Pendapatannya Kurang dari \$1 per hari | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1984 | 1987 | 1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2001 |
| Asia Timur | 562,2 | 425,6 | 472,2 | 415,4 | 286,7 | 281,7 | 271,3 |
| Cina | 425,0 | 308,4 | 374,8 | 334,2 | 211,6 | 222,8 | 211,6 |
| Eropa dan AsiaTengah | 2,4 | 1,7 | 2,3 | 17,5 | 20,1 | 30,1 | 17,0 |
| Amerika Latin&Kepulauan Karibia | 46,0 | 45,1 | 49,3 | 52,0 | 52,2 | 53,6 | 49,8 |
| Timur Tengah&Afrika Utara | 7,6 | 6,9 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 7,7 | 7,1 |
| Asia Selatan | 460,3 | 473,3 | 462,3 | 476,2 | 461,3 | 428,5 | 431,1 |
| India | 373,5 | 369,8 | 357,4 | 380,0 | 399,5 | 352,4 | 358,6 |
| Afrika sub-Sahara | 198,3 | 218,6 | 226,8 | 242,3 | 271,4 | 294,3 | 312,7 |
| Total | 1276, | 1171, | 1218, | 1207, | 1097, | 1095, | 1089, |
| | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |

Sumber : World Development Report(2003)

Tabel 4.4. Kemiskinan Pendapatan Berdasarkan Wilayah, 1981-2001
(Persen)

| Wilayah | Penduduk yang Pendapatannya Kurang dari \$1 per hari | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | 1984 | 1987 | 1990 | 1993 | 1996 | 1999 | 2001 |
| Asia Timur | 38,9 | 28,0 | 29,6 | 24,9 | 16,6 | 15,7 | 14,9 |
| Cina | 41,0 | 28,5 | 33,0 | 28,4 | 17,4 | 17,8 | 16,6 |
| Asia Timur Tak Termasuk China | 33,5 | 27,0 | 21,1 | 16,7 | 14,7 | 11,0 | 10,8 |
| Eropa dan AsiaTengah | 11,8 | 10,9 | 11,3 | 11,3 | 10,7 | 10,5 | 9,5 |
| Amerika Latin & Kepulauan Karibia | 3,8 | 3,2 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 2,4 |
| Timur Tengah&Afrika Utara | 46,8 | 45,0 | 41,3 | 40,1 | 36,6 | 32,2 | 31,3 |
| Asia Selatan | 49,8 | 46,3 | 42,1 | 42,3 | 42,2 | 35,3 | 34,7 |
| India | 37,0 | 41,0 | 38,7 | 33,1 | 19,7 | 22,9 | 21,0 |
| Asia Selatan TakTermasuk India | 46,3 | 46,8 | 44,6 | 44,1 | 45,6 | 45,7 | 46,4 |
| | 32,8 | 28,4 | 27,9 | 26,3 | 22,8 | 21,8 | 21,2 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Afrika sub-Sahara | 31,7 | 28,4 | 26,1 | 25,6 | 24,6 | 23,1 | 22,5 |
| Total | | | | | | | |
| Tidak Termasuk Cina | | | | | | | |

Sumber : World Development Report(2003)

Tabel diatas menunjukkan tren kemiskinan absolut di negara-negara berkembang interval antara tahun 1984-2001. Dalam tabel diatas garis kemiskinan dinyatakan sebesar 1 dolar perhari, tetapi pada paritas daya beli dolar tahun 1993, garis kemiskinan aktual adalah sebesar 1,08 dolar. Ternyata masih terdapat 1,1 milyar jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Proporsi penduduk miskin di negara-negara berkembang menurun secara signifikan yaitu dari 32,8% pada tahun 1984 menjadi 22,5% pada tahun 2001. Kondisi kemiskinan di tiap wilayah bisa sangat berbeda, ketika persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut di Asia Timur menurun, dari 38,9% pada tahun 1984 menjadi 14,9% pada tahun 2001, kemiskinan di sub-sahara justru meningkat dari 198,3 juta jiwa menjadi 312,7. Di Eropa dan Asia Tengah angka kemiskinan meningkat dari hanya 2,4 juta jiwa menjadi 17 juta jiwa. Negara-negara di Asia Selatan dan Afrika sub-sahara memiliki lebih dari dua per tiga penduduk miskin di dunia.

Angka kemiskinan absolut di negara-negara berkembang sangat bervariasi, begitu pula kemajuan dan kemunduran yang mereka hadapi dalam usaha mengurangi kemiskinan.

Kesehatan

Negara-negara berkembang banyak menghadapi masalah kekurangan gizi, penyakit dan kesehatan yang buruk. Pada tahun 1998 rata-rata usia harapan hidup di negara-negara yang paling terbelakang di dunia hanya mencapai 48 tahun, di negara-negara berkembang lainnya 64 tahun, dan di negara maju mencapai 75 tahun.

Tingkat kematian bayi, yakni jumlah anak yang mati sebelum berusia 1 tahun untuk setiap 1000 kelahiran, di negara-negara yang paling terbelakang rata-rata mencapai 96, di negara-negara berkembang lainnya mencapai 64 dan Negara maju hanya 8.

Keadaan ini terus memburuk pada dekade 1990-an, terutama di kawasan afrika sub-sahara. Lebih dari 60 persen penduduk Afrika sub-sahara tidak mampu memebuhi kebutuhan kalori minimum yang diperlukan untuk hidup sehat. Penyediaan pelayanan kesehatan secara memadai sebagai bagian dari paket pelayanan sosial masih sangat jarang ditemui di negara-negara berkembang.

Tabel 4.5. Kekurangan Fasilitas Kesehatan Manusia dan Pendidikan di Negara-Negara Berkembang, 2001

| Bentuk Kekurangan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Penderita |
|---|------------------|
| Ketiadaan akses pelayanan kesehatan | 766 juta |
| Ketiadaan sumber air bersih | 1,2 juta |
| Ketiadaan Sanitasi | 2,4 miliar |
| Kematian balita (sebelum berumur 5 tahun) | 112 juta |
| Kurangnya berat badan di kalangan balita | 163 juta |
| Orang menderita HIV/AIDS | 34 juta |
| Buta huruf di kalangan dewasa | 854 juta |
| Anak-anak yang tidak bersekolah | 325 juta |

Sumber : World Development Report(2003)

Sebagian besar fasilitas kesehatan berpusat di perkotaan yang hanya dihuni 25 persen penduduk, sementara masyarakat yang tinggal di desa kekurangan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal penyediaan biaya kesehatan, lebih dari 75 persen dana kesehatan di kebanyakan negara-negara berkembang diperuntukkan kepada rumah sakit-rumah sakit di daerah perkotaan yang tarif pengobatannya cukup mahal sehingga pelayanannya hanya akan bisa dinikmati segelintir masyarakat.

Akibat dari fasilitas dan pelayanan kesehatan yang serba buruk dan sangat terbatas, sebagian besar penduduk masih menderita malnutrisi, dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi sepuluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju.

Pendidikan

Disebagian besar negara-negara berkembang bagian terbesar anggaran pengeluaran pemerintah dialokasikan ke sektor pendidikan. Walaupun jumlah penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan sudah banyak meningkat, namun tingkat buta huruf masih sangat tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan Negara maju.

Karena berbagai alasan lebih dari 325 juta anak-anak diberbagai penjuru negara-negara berkembang terpaksa keluar dari bangku sekolah dasar dan menengah. Sekitar 854 juta penduduk negara berkembang berusia dewasa masih buta huruf, dan 60 persen di antaranya adalah wanita. Materi-materi pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sekolahpun acapkali kurang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional di negara tersebut.

2. Produktivitas yang Rendah

Negara-negara berkembang juga menghadapi masalah rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja (*labor productivity*). Rendahnya produktivitas tenaga kerja di negara berkembang disebabkan oleh kurangnya faktor-faktor atau input komplementer (faktor produksi selain tenaga kerja) seperti modal dan atau kecakapan manajemen yang penuh pengalaman.

Tingkat produktivitas dapat dinaikkan dengan cara memobilisasi tabungan domestik dan penarikan bantuan modal asing guna meningkatkan investasi baru berupa pengadaan barang-barang modal serta investasi di bidang pendidikan dan pelatihan untuk menambah keterampilan pengelolaan setiap tenaga kerja yang terlibat.

Produktivitas yang rendah juga disebabkan dari lemahnya kekuatan dan kesehatan fisik para pekerja yang merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendapatan, sehingga mayoritas penduduk sangat sulit membeli dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan padat gizi. Kekurangan gizi pada masa anak-anak dapat membatasi pertumbuhan mental dan fisik.

Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang rendah, dan selanjutnya akan menyebabkan ketidakmampuan dalam penyediaan makanan bergizi. Kekurangan gizi dapat mengakibatkan rendahnya kapasitas untuk bekerja, sehingga produktivitas menjadi semakin rendah. Rendahnya tingkat produktivitas maupun standar hidup di negara berkembang merupakan suatu fenomena social sekaligus fenomena ekonomi.

3. Tingkat Pertumbuhan penduduk dan Beban Ketergantungan yang Tinggi

Total penduduk dunia pada tahun 2006 telah mencapai 6 miliar jiwa, dan lebih dari lima perenam dari jumlah tersebut hidup di Negara berkembang, sedangkan yang menghuni negara maju hanya seperenamnya. Tingkat kelahiran di negara-negara berkembang sangat tinggi berkisar 30-40 untuk tiap 1000 penduduk, sedangkan di negara maju kurang dari setengahnya.

Tabel 4.6. Angka Kelahiran di Seluruh Dunia, 1996

| Angka Kelahiran | Negara |
|------------------------|---|
| 50 | Niger, Mali, Uganda, Somalia, Gaza, Afganistan, Angola, Malawi, Sierra Leone. |
| 45 | Kongo, Kamboja, Ethiopia, Tanzania, |

| | |
|----|--|
| | gambia, Benin, Burkino Faso, Mozambik, Zambia, Burundi, Yaman, Togo. |
| 40 | Kamerun, Chad, Laos, Sudan, Zimbabwe, Guinea, Liberia, Senegal, Libya, Nigeria, Bhutan, Rep. Afrika Tengah, Swaziland. |

(Sambungan)

| Angka Kelahiran | Negara |
|------------------------|---|
| 35 | Honduras, Paraguay, Bolivia, Yordania, Gabon, Nepal, Nambia, Pakistan, Kenya, Irak, Iran, Botswana. |
| 30 | Peru, Myanmar, Filipina, Ajlazair, Mesir, India, Haiti, Bangladesh, Syria, El Salvador, Paraguay. |
| 25 | Bolivia, Kolumbia, Panama, Indonesia, Kostarica, Meksiko, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Venezuela, Afrika Selatan. |
| 20 | Vietnam, Turki, Sri Lanka, Cili, Argentina, Jamaika, Brazil. |
| 15 | Amerika Serikat, Kanada, Australia, Irlandia, Kuba, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Cina, Thailand. |

| | |
|----|--|
| 10 | Swiss, Austria, Jerman, Jepang, Rusia. |
|----|--|

Sumber : Todaro (2004)

Angka kelahiran pada tabel diatas merupakan jumlah bayi yang lahir per tahun dan hidup setiap 1000 penduduk. Sedikit sekali Negara berkembang yang mempunyai tingkat kelahiran dibawah 20 untuk setiap 1000 penduduknya, dan tidak ada satupun Negara maju yang memiliki tingkat kelahiran diatas 20. Sehingga angka kelahiran dapat dijadikan tolok ukur untuk membedakan negara berkembang dengan negara maju.

Salah satu implikasi atas tingginya angka kelahiran adalah hampir 40 persen penduduk di negara berkembang terdiri dari anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun, sedangkan di negara maju tidak sampai 20 persen. Di negara maju proporsi penduduk yang berumur di atas 65 tahun jauh lebih besar. Penduduk yang berusia lanjut dan anak-anak secara ekonomis di sebut beban ketergantungan. Mereka adalah anggota masyarakat yang tidak produktif sehingga menjadi beban tanggungan angkatan kerja yang produktif. Beban ketergantungan di negara maju mencapai sepertiga dari total penduduk, sedangkan di negara berkembang mencapai 45 persen. Beban ketergantungan yang terdiri dari anak-anak mencapai 90 persen di negara berkembang, sedangkan di negara-negara kaya hanya sekitar 66 persen.

Tingkat kematian, yakni jumlah orang yang meninggal setiap 1000 penduduk relative tinggi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju.

4. Ketergantungan Terhadap Produksi Pertanian dan Ekspor Barang-Barang Primer

Lebih dari 65 persen jumlah penduduk di negara-negara berkembang tinggal secara permanen bahkan turun temurun di pedesaan. Sekitar 58 persen angkatan kerja di negara berkembang mencari nafkah di sektor pertanian. Sumbangan sektor pertanian di negara berkembang terhadap GNP secara keseluruhan berkisar pada angka 14 persen.

Tabel 4.7. Populasi, Angkatan Kerja, dan Produksi Pertanian di Berbagai Kawasan Maju dan Berkembang, 1995 – 1997

| Wilayah | Populasi (Juta) | Kota (%) | Desa (%) | % Pekerja Pertanian | % Sumbangan Pertanian Bagi GNP |
|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Dunia | 5,840 | 43 | 57 | 49 | - |
| Negara Maju | 1,175 | 74 | 26 | 5 | 3 |
| Eropa | 729 | 72 | 28 | 7 | 5 |
| Amerika Utara | 298 | 75 | 25 | 3 | 2 |
| Jepang | 126 | 78 | 22 | 7 | 2 |
| Negara Berkembang | 4,666 | 36 | 64 | 58 | 14 |
| Afrika | 743 | 31 | 69 | 68 | 20 |
| Asia Selatan | 1,417 | 27 | 73 | 64 | 30 |
| Asia Timur | 1,958 | 35 | 65 | 70 | 18 |
| Amerika Latin | 490 | 72 | 28 | 25 | 10 |

Sumber : Todaro (2004)

Rendahnya produktivitas pertanian di negara-negara berkembang antara lain disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk di bandingkan dengan luas lahan yang tersedia, juga disebabkan rendahnya teknologi yang digunakan, organisasi atau pengelolaan yang buruk, terbatasnya kualitas input modal fisik dan manusia. Keterbelakangan teknologi dikarenakan pertanian negara-negara berkembang didominasi oleh petani-petani kecil nonkomersial. Selain itu kebanyakan petani tidak memiliki tanah sendiri.

Perekonomian negara-negara berkembang lebih banyak berorientasi ke produksi barang primer dari pada barang sekunder dan barang tersier. Komoditi primer (produk pertanian, bahan bakar, hasil hutan, dan bahan-bahan mentah) merupakan andalan ekspor yang utama ke negara-negara lain (baik ke Negara-negara maju maupun ke sesama negara-negara berkembang). Ekspor berbagai macam komoditi primer merupakan sumber devisa utama bagi negara berkembang. Lebih dari 50 persen jumlah mata uang asing yang dimiliki diperoleh dari ekspor komoditi primer. Tetapi banyak Negara berkembang yang terlilit hutang dalam jumlah yang sangat besar sehingga sebagian besar devisa hasil ekspor pada tahun 1980-an dan 1990-an harus terkuras sebagai pembayaran cicilan dan bunga hutang, bahkan selama beberapa tahun terakhir mereka mengalami arus modal internasional yang negatif, artinya mata uang asing yang mengalir keluar ternyata lebih banyak daripada yang mengalir masuk.

5. Pasar yang Tidak Sempurna dan Informasi yang Tidak Memadai

Di banyak negara berkembang, perangkat hukum legal dan konstitusionalnya masih sangat lemah guna mendukung beroperasinya mekanisme pasar secara efektif dan efisien. Dalam situasi di mana kepastian hukum begitu minim, bisnis tak akan berkembang dengan baik.

Pasar di negara-negara berkembang sering kali sangat tidak sempurna, informasi juga sangat terbatas dan untuk mendapatkannya diperlukan biaya yang tinggi, selain itu juga sering menyebabkan barang, keuangan, dan sumber-sumber daya sulit menyebar, hal ini seringkali mengakibatkan alokasi sumber daya tidak tepat.

6. Dominasi, Ketergantungan, dan Kerapuhan dan Hubungan Internasional

Distribusi kekuatan politik dan ekonomi yang tidak merata antara negara-negara kaya dan miskin, menjadi salah satu factor utama yang mengakibatkan rendahnya standar hidup di negara-negara berkembang. Perimbangan kekuatan yang sangat timpang tersebut tidak hanya berwujud pada kekuasaan negara-negara kaya dalam mengatur pola perdagangan internasional, namun juga pada kemampuan mereka untuk mendiktekan syarat-syarat transfer teknologi,

pemberian pinjaman, dan pelaksanaan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang.

Aspek-aspek penting lainnya dalam proses transfer internasional yang turut mempersulit usaha-usaha pembangunan negara-negara miskin. Faktor yang tidak kentara tapi sangat penting yang turut menyebabkan berlarut-larutnya keterbelakangan Negara-negara dunia ketiga, yakni transfer nilai-nilai, sikap kelembagaan, dan standar-standar perilaku dari negara-negara dunia pertama dan kedua ke negara-negara dunia ke tiga. Hal tersebut meliputi transfer struktur pendidikan, kurikulum, sistem sekolah yang sering tidak sesuai, pembentukan serikat buruh ala barat yang terlalu longgar dan agresif menurut ukuran timur, pengadaan berbagai macam organisasi dan orientasi pelayanan kesehatan ala barat yang lebih bersifat kuratif bukannya preventif, serta transfer corak prosedur dan sistem administrasi dan birokrasi pemerintah yang kesemuanya itu sebenarnya kurang tepat atau tidak relevan dengan kebutuhan dan kepentingan negara-negara dunia ketiga.

Dinegara berkembang juga dikenal istilah “pengurasan intelektual antar negara” (*international brain drain*), yakni migrasi atau perpindahan tenaga-tenaga profesional dan kaum cendekiawan dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Jadi sementara yang melahirkan, membina, dan membiayai adalah negara-negara berkembang, tapi yang memetik manfaatnya justru negara-negara maju. Hijrahnya tenaga profesional ini dengan alasan mencari penghidupan dan imbalan yang lebih baik.

4.3. Keadaan Negara-Negara Muslim Saat Ini

1. Ketiadaan Demokrasi

Enam ratus tahun telah berlalu sejak Ibnu Khaldun Menulis *Muqadimah*. Masyarakat muslim terus mengalami kemunduran dibandingkan dengan Negara-negara industry walaupun fenomena ini bukan merupakan garis lurus dan beberapa negara muslim memiliki keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan Negara muslim yang lain.

Menurut Ibnu Khaldun pemicu kemunduran umat Islam adalah proses politik yang tidak absah, yang dimulai ketika Mu'awiyah khalifah kelima, mewariskan kekuasaannya kepada anaknya Yazid pada tahun 60/679.

Proses politik yang tidak absah terus berlangsung di negara-negara muslim hingga saat ini. Dunia muslim yang saat ini lebih luas dan bervariasi dari pada era Ibnu Khaldun dulu, sampai saat ini tidak dapat menegakkan prosedur pemindahan kekuasaan kepada yang lebih jujur dan kompeten dalam pandangan masyarakat dan berdasarkan ketentuan Al-Quran (49:13).

Hanya 13 negara dari 57 negara (kurang dari 23%) anggota organisasi konferensi Islam (OKI) yang memiliki demokrasi, sementara 44 negara lainnya tidak berdemokrasi, dari 44 negara ini 33 negara memiliki demokrasi palsu, 5 negara kerajaan absolute, 3 negara tergolong diktator, dan 5 negara pada kondisi transisi. (Chapra, 2006).

Ketika proses demokrasi dapat menjamin *good governance* penggunaan sumber daya publik secara efektif dalam proses pembangunan di negara-negara barat, dunia muslim justru mengalami ketertinggalan karena ketiadaan demokrasi sehingga negara mengabaikan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

2. Prestasi Ekonomi yang Rendah

Ketiadaan demokrasi melahirkan berbagai keburukan lain. Salah satunya adalah kurangnya kebebasan pers. Hanya 4 negara muslim yang memiliki kebebasan pers, 14 negara bebas sebagian dan 39 negara tidak bebas. (Chapra, 2006). Ketidakmampuan dalam mengkritisi pemerintah melalui media maupun forum menyebabkan pemerintahan yang buruk, ketidaktransparanan, kebijakan yang tidak sehat. Hal ini juga mendorong terjadinya korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi pihak-pihak kaya dan berkuasa. Korupsi dan pemerintahan yang buruk memberikan dampak negatif pada pembangunan (Kuran, 1999).

Berdasarkan indeks persepsi korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International, hanya lima Negara yang memiliki nilai IPK diatas 5.

Dimana angka lima ini merupakan garis batas. Sedangkan dua puluh tujuh lainnya jauh berada dibawah garis batas ini.

Akibat dari korupsi, sumber daya negara banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi penguasa, sehingga pemerintah tidak dapat mengeluarkan anggaran yang memadai untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastuktur, dan menyediakan pelayanan publik untuk mempercepat pembangunan. Korupsi juga menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sehingga mendorong penurunan investasi. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara-negara muslim. Walaupun populasi muslim di 57 negara muslim mencapai 1331 juta dari 6199 total populasi penduduk dunia, total GNP negara-negara muslim hanya \$3993 milyar yaitu 8,2% dari total GNP dunia yang besarnya \$48,462 milyar. Menurut kriteria Bank Dunia Hanya 4 negara muslim yang tergolong Negara berpendapatan tinggi, 6 negara berpendapatan menengah atas, 18 negara berpendapatan rendah menengah dan 29 negara berpendapatan rendah.

Pendidikan yang pada masa Islam dulu merupakan prioritas utama dan merupakan penyebab kebangkitan, kurang mendapatkan anggaran yang memadai dari pemerintah. Tingkat buta huruf dewasa di negara-negara muslim mencapai 32% pada tahun 2003 (Islamic development bank,2005), artinya terdapat sekitar 426 juta orang yang buta huruf dan tidak dapat memberikan berkontribusi optimal terhadap pembangunan. Negara-negara muslim hanya memiliki 600 universitas, sementara Amerika Serikat saja memiliki 1975 universitas atau tiga kali lebih banyak.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan laporan UNDP, lima Negara muslim memiliki nilai HDI yang tinggi, sedangkan 31 negara memiliki nilai HDI menengah, dan 21 negara lainnya memiliki nilai HDI yang rendah.

Permasalah HDI adalah karena ia hanya memasukan tiga variabel, yaitu harapan hidup, buta huruf, dan GDP per kapita yang dinilai dengan keseimbangan

daya beli. Indeks ini merefleksikan kerangka kerja sekuler dalam ilmu ekonomi pembangunan.

Merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan indeks yang lebih komprehensif, yang memasukan variabel-variabel penting lainnya seperti keadilan, keluarga dan masyarakat yang harmonis, jaminan kerja, keamanan lingkungan, demokrasi, kebebasan berkespresi, distribusi kekayaan dan kesejahteraan yang adil, dan sistem pengadilan yang baik.

4.4. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Analisis data yang dilakukan pada bagian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan dan hipotesis yang telah dibangun dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh variabel-variabel dalam model dinamika Ibnu Khaldun terhadap tingkat kemiskinan di negara-negara muslim. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan hipotesis penelitian adalah teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif.

4.4.1. Analisis Data Panel Pengaruh Variabel-Variabel Dalam Model Dinamika Ibnu Khaldun Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Beberapa Negara Muslim.

Model regresi yang akan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan variabel Masyarakat (N), Pemerintah (G), Kekayaan (W), Syariah (S), Pembangunan dan Keadilan (g dan j).

Variabel masyarakat (N) *diproxi* dari *Human Development Index* yang dipublikasikan oleh UNDP. Indeks ini memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. *Longevity* diukur dari angka harapan hidup, *knowledge* direpresentasikan oleh ukuran angka melek huruf dewasa dan rata-rata sekolah sementara akses terhadap sumberdaya diukur dari paritas kekuatan daya beli riil terhadap pendapatan perkapita.

Variabel pemerintah (G) akan diukur dengan pengeluaran publik pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan yang dipresentasikan dengan total PDB. Variabel kekayaan diukur dengan nilai total investasi pertahun.

Variabel pembangunan dan keadilan diukur dengan tingkat pertumbuhan GDP perkapita pertahun dan gini rasio. Gini rasio menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan. Variabel syariah diukur dari apakah negara tersebut menggunakan hukum Islam atau tidak.

Adapun rumusan model regresi yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel dalam model dinamika Ibnu Khaldun terhadap tingkat kemiskinan di negara-negara muslim adalah sebagai berikut:

$$Miskin = \alpha + \beta_1 \ln_inves + \beta_2 \ln_GDPkap + \beta_3 Gini + \beta_4 Health + \beta_5 Educ + \beta_6 HDI + \beta_7 Kons \quad (4.1)$$

Dimana :

Miskin = Jumlah penduduk miskin

Ln_inves = Total investasi per tahun

Ln_GDPkap = produk domestik bruto per kapita

Gini = Indeks gini

Health = pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan

Educ = pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan.

Konstitusi = Variabel Dummy, konstitusi negara berdasarkan Islam atau bukan.

Untuk memilih metode yang akan digunakan dalam mengolah data panel dilakukan dengan uji formal. Caranya ialah dengan melakukan uji dengan Chow test untuk menentukan antara menggunakan metode biasa (PLS/ *Pooled Least Square*) atau metode efek tetap (MET/*fixed effect*), dan uji *Hausman* untuk

menentukan antara menggunakan metode efek tetap atau metode efek random (MER/ *random effect*).

Dari hasil yang didapatkan, ternyata model yang menguji pengaruh variabel-variabel yang terdapat dalam model dinamika Ibnu Khaldun terhadap tingkat kemiskinan hanya dapat diestimasi dengan menggunakan metode biasa (*Pooled Least Square*). Hal ini karena didalam model terdapat variabel dummy.

Oleh karena model tidak dapat diestimasi dengan metode efek tetap (MET/*fixed effect*) maupun metode efek random (MER/ *random effect*) maka uji *Chow* dan uji *Hausman* tidak dapat dilakukan. Sehingga model yang menguji pengaruh variabel-variabel yang terdapat dalam model dinamika Ibnu Khaldun terhadap tingkat kemiskinan digunakan metode biasa (*Pooled Least Square*).

Setelah menentukan metode estimasi, selanjutnya ialah menganalisis indikator-indikator yang mengukur sebaik apa model mampu menjelaskan kenyataan ekonomi yang ada. Oleh karena itu perlu dilihat nilai indikator-indikator yang mengukur baik tidaknya hasil estimasi.

Dalam pengolahan data, terkadang tidak langsung memberikan hasil yang terbaik, seperti masih terdapatnya masalah dalam memenuhi asumsi BLUE. Sehingga data harus diolah kembali untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Tahap pertama, data diolah dengan metode biasa, dengan menggunakan program *EViews*. Dari hasil pengolahan data diperoleh output sebagai berikut :

Tabel 4.8. Regresi Panel Data Dengan PLS

| |
|-----------------------------------|
| Dependent Variable: MISKIN? |
| Method: Pooled Least Squares |
| Date: 12/28/08 Time: 23:14 |
| Sample: 2000 2004 |
| Included observations: 5 |
| Number of cross-sections used: 15 |

| Total panel (balanced) observations: 75 | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|----------|
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| C | 74.61850 | 27.63978 | 2.699677 | 0.0088 |
| LNINVES? | -3.543885 | 0.788339 | -4.495385 | 0.0000 |
| LNGDPKAP? | 3.006298 | 4.035620 | 0.744941 | 0.4589 |
| GINI? | 0.245430 | 0.216895 | 1.131563 | 0.2619 |
| HEALTH? | -1.009668 | 1.127466 | -0.895520 | 0.3737 |
| EDUC? | -1.260832 | 0.802947 | -1.570255 | 0.1211 |
| HDI? | -0.723723 | 0.194537 | -3.720234 | 0.0004 |
| KONS? | 3.505714 | 3.133723 | 1.118706 | 0.2673 |
| R-squared | 0.830334 | Mean dependent var | | 31.63600 |
| Adjusted R-squared | 0.812608 | S.D. dependent var | | 17.03165 |
| S.E. of regression | 7.372802 | Sum squared resid | | 3642.000 |
| F-statistic | 46.84195 | Durbin-Watson stat | | 0.448178 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Sumber : Pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan hasil estimasi masih belum cukup baik. Dari hasil output, diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 81,3% artinya variabel independen (lnInves, lnGDPkap, gini, Health, Educ, HDI, Konstitusi) secara bersama-sama menjelaskan perilaku variabel dependen (miskin) sebesar 81,3%, sedangkan sisanya 18,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Mengingat data yang digunakan juga merupakan data *cross section* maka dicurigai terdapat heteroskedastis. Hal ini dapat dibuktikan dengan memberi perlakuan *white heteroskedasticity consisten covariance* pada model dengan menggunakan teknik *Generalized Least Square/GLS* (Widarjono, 2007: 225).

Jika nilai *sum of squared resid* sebelum perlakuan lebih besar dari nilai setelah perlakuan, maka model awal itu mengalami masalah heteroskedastisitas. Selain itu, selain dengan melihat nilai *sum of squared resid* untuk memeriksa heteroskedastisitas, bisa terlihat juga dari standar *error* koefisien yang menjadi lebih rendah (Nachrowi dan Usman, 2006:336).

Tabel 4.9. Regresi Panel Data Setelah Perlakuan Heteroskedastisitas Dan Autokorelasi

| Dependent Variable: MISKIN? | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|--------|
| Method: GLS (Cross Section Weights) | | | | |
| Date: 12/28/08 Time: 23:15 | | | | |
| Sample: 2000 2004 | | | | |
| Included observations: 5 | | | | |
| Number of cross-sections used: 15 | | | | |
| Total panel (balanced) observations: 75 | | | | |
| One-step weighting matrix | | | | |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| C | 50.55061 | 19.56968 | 2.583109 | 0.0120 |
| LNINVES? | -3.432805 | 0.585154 | -5.866496 | 0.0000 |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
| LNGDPKAP? | 7.456684 | 2.965698 | 2.514310 | 0.0143 |
| GINI? | 0.269712 | 0.160394 | 1.681561 | 0.0973 |
| HEALTH? | -1.290941 | 0.690905 | -1.868478 | 0.0661 |
| EDUC? | -1.394215 | 0.484586 | -2.877124 | 0.0054 |
| HDI? | -0.922351 | 0.131772 | -6.999575 | 0.0000 |
| KONS? | 0.116277 | 2.501521 | 0.046482 | 0.9631 |
| Weighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.979975 | Mean dependent var | 49.29445 | |
| Adjusted R-squared | 0.977883 | S.D. dependent var | 45.59813 | |
| S.E. of regression | 6.781247 | Sum squared resid | 3081.016 | |
| F-statistic | 468.4073 | Durbin-Watson stat | 0.692615 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |
| Unweighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.819185 | Mean dependent var | 31.63600 | |
| Adjusted R-squared | 0.800294 | S.D. dependent var | 17.03165 | |
| S.E. of regression | 7.611191 | Sum squared resid | 3881.326 | |
| Durbin-Watson stat | 0.486466 | | | |

Sumber : Pengolahan data

Berdasarkan tabel 4.9. terlihat bahwa nilai *sum of squared resid* berbeda sebelum dan sesudah perlakuan, hal tersebut mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Perubahan lainnya nampak dari koefisien standar *error* yang nilainya lebih rendah setelah mengalami perlakuan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa heteroskedastisitas ada pada data awal. Dengan dipergunakannya teknik estimasi menggunakan GLS tersebut secara otomatis model terbebas dari heteroskedastisitas dan autokorelasi mengingat estimator yang kita dapatkan mempunyai varian yang minimum atau efisien (Widarjono, 2007: 257). Setelah model tersebut bebas dari heteroskedastisitas, nilai R^2 meningkat dari 81,3%

menjadi 97,8%. Artinya, variabel independen (lnInves, lnGDPkap, Gini, Health, Educ, HDI, Kons) mampu menjelaskan variabel dependen (Miskin) sebesar 97,8% sedangkan sisanya yang hanya 2,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Cara lain untuk mengecek masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai jumlah kuadrat sisa (*sum of squared resid*) antara hasil estimasi dengan pembobotan dan tanpa pembobotan. Jumlah kuadrat sisa dengan pembobotan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kuadrat sisa tanpa pembobotan hal ini menunjukkan bahwa heteroskedastisitas ada pada data awal.

Hasil estimasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah hasil estimasi dengan pembobotan, karena estimasi dengan pembobotan menghasilkan variabel independen yang signifikan secara lebih banyak.

4.4.2. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengolahan data pengaruh variabel-variabel dalam model dinamika Ibnu Khaldun terhadap tingkat kemiskinan di negara-negara muslim, persamaan yang didapat dari hasil estimasi dengan menggunakan data panel dengan metode PLS. Adapun persamaan dengan metode PLS tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Miskin} = 50,55061 - 3,432805 \ln_inves + 7,456684 \ln_GDPkap + 0,269712 \text{Gini} - 1,290941 \text{Health} - 1,394215 \text{Educ} - 0,922351 \text{HDI} + 0,116277 \text{Kons}$$

Dalam model ini sebagian besar variabel independen bersifat signifikan dilihat dari probabilitas yang dibawah nilai kritis 5% dengan besaran sebagai berikut :

Tabel 4.10. Koefisien dan Konstanta Model

| Variabel | Koefisien | Prob |
|-----------|-----------|--------|
| Konstanta | 50,55061 | 0,0120 |
| Lninves | -3,432805 | 0,0000 |
| lnGDPkap | 7,456684 | 0,0143 |
| GINI | 0,269712 | 0,0973 |
| HEALTH | -1,290941 | 0,0661 |
| EDUC | -1,394215 | 0,0054 |
| HDI | -0,922351 | 0,0000 |
| KONS | 0,116277 | 0,9631 |

Sumber : Pengolahan Data

Untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial digunakan uji t. Berdasarkan output yang dihasilkan variabel yang signifikan secara statistik pada $\alpha=5\%$ adalah lnInves, lnGDPkap, pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Variabel yang signifikan secara statistik pada $\alpha=10\%$ adalah Gini indeks dan pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan. Sedangkan variabel yang tidak signifikan adalah konstitusi negara.

Untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berdasarkan output yang dihasilkan nilai probabilitas F statistik yang dihasilkan signifikan pada $\alpha = 5 \%$, maka artinya variabel bebas dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan pada $\alpha = 5 \%$.

4.4.3. Interpretasi dan Analisis Model

a. Variabel total investasi negara yang merupakan proxi dari Variabel Kekayaan (W)

Berdasarkan hasil estimasi model tersebut slope koefisien β_1 menunjukkan arah yang negatif, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara total investasi dengan tingkat kemiskinan. Koefisien slope yang didapat sebesar -3,432805. Data yang digunakan dalam model ini merupakan data negara-negara muslim, sehingga interpretasi dari koefisien slope tersebut adalah bila total investasi negara A lebih besar 10% dibandingkan negara B, maka akan menyebabkan jumlah penduduk miskin di negara A lebih rendah 34,32805% dibanding negara B.

Kekayaan (W) merupakan salah satu variabel di dalam model dinamika Ibnu Khaldun. Kekayaan merupakan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin keadilan dan pembangunan, efektivitas kebijakan pemerintah, dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Investasi akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Investasi akan mendorong kenaikan tingkat pendapatan sehingga akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan pajak sehingga memungkinkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.11. Total Investasi dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2004

| Negara | Penduduk miskin | Total Investasi (Bill \$) |
|---------------|------------------------|----------------------------------|
| Jordan | 14,2 | 3123,98 |
| Tunisia | 7,6 | 6795,91 |
| Gambia | 57,6 | 112,63 |
| Senegal | 33,4 | 1674,45 |
| Malaysia | 15,5 | 28754,21 |
| Algeria | 22,6 | 28282,63 |
| Guinea | 40 | 447,39 |

| | | |
|------------|------|----------|
| Morocco | 19 | 16209,52 |
| Cameroon | 40,2 | 2983,05 |
| Niger | 63 | 482,32 |
| Egypt | 16,7 | 13354,78 |
| Nigeria | 34,1 | 16113,34 |
| Pakistan | 32,6 | 16245,59 |
| Indonesia | 27,1 | 3123,98 |
| Bangladesh | 49,8 | 13615,4 |

Sumber : Human Development Report, 2006

Niger merupakan negara dengan tingkat kemiskinan paling parah, yaitu sebanyak 63 % penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan nasional negaranya dengan total investasi yang dimiliki 482,32 miliar dollar.

Negara yang paling rendah tingkat kemiskinannya adalah Tunisia yaitu 7,6 % dari total penduduknya, dengan jumlah investasi yang dimiliki sebanyak 6795,91 miliar dollar.

Kenyataan di atas membuktikan bahwa invesatasi memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena investasi membantu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sehingga kemiskinan akan berkurang.

b. Variabel pertumbuhan GDP dan Gini Rasio yang merupakan proxi dari Variabel Pembangunan dan Keadilan (g dan j)

Berdasarkan hasil estimasi slope koefisien β_2 menunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara GDP per kapita dengan tingkat kemiskinan. Koefisien slope yang didapat sebesar 7,456684, sehingga interprestasi dari koefisien slope tersebut adalah bila GDP per kapita negara A lebih besar 10%dibandingkan negara B,maka akan menyebabkan jumlah penduduk miskin di negara A lebih banyak 74,56684% dibanding negara B.

Dari hasil uji t diketahui nilai sig.(t) sebesar 0,0143 lebih kecil dari 0,05, maka $H_0: \beta_2 = 0$ ditolak, yang berarti bahwa GDP per kapita memiliki pengaruh yang signifikan. $H_1: \beta_2 \neq 0$ yang menyatakan bahwa ada pengaruh GDP per kapita terhadap tingkat kemiskinan.

Kondisi ini sesuai dengan konsep pembangunan Todaro (2004), bahwa pembangunan memang memerlukan pertumbuhan yang cepat. Namun masalah dasarnya bukan hanya bagaimana menumbuhkan GDP tetapi juga siapa yang menumbuhkan GDP, sejumlah besar masyarakat yang ada di dalam sebuah negara atautkah hanya segelintir orang di dalamnya. Jika yang menumbuhkannya hanyalah orang-orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat pertumbuhan GNP itu hanya akan dinikmati oleh mereka saja, sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatanpun akan semakin parah. Masih menurut Todaro, hal inilah yang menyebabkan banyak negara berkembang yang dalam sejarahnya menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menemukan bahwa pertumbuhan semacam ini kurang memberikan manfaat kepada kaum miskin.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Tambunan (2004), dimana koefisien pertumbuhan ekonomi negatif (-1,99) dan signifikan terhadap perubahan kemiskinan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan perubahan kemiskinan. Dengan kata lain jika terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi akan dapat mengurangi laju pertumbuhan kemiskinan sebesar 1,99 satuan.

Dasar analisis dari penelitian Tambunan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah fenomena *trickle-down effect* dari pertumbuhan ekonomi. Bentuk dari dampak “penetesan kebawah” tersebut terutama dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja dan tingkat upah/gaji riil yang lebih tinggi bagi kelompok miskin. Dan hubungan ini bisa terjadi seperti yang diharapkan (hipotesis) dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain mendukung. Dengan kata lain, jika terdapat mekanisme yang mendukung sepenuhnya *trickle-down effect* dari keuntungan pertumbuhan ekonomi kepada kaum miskin, maka pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu alat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Sedangkan menurut penelitian Adelman dan C.T.Moris (1973) dalam Todaro (2001) yang meneliti pertumbuhan ekonomi di 43 negara berkembang menunjukkan bahwa tidak ada bukti adanya manfaat yang “menetes kebawah secara otomatis” (*down effect*) dari pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya proses pertumbuhan ke 43 negara berkembang tersebut telah menguntungkan (*trickle up*) golongan masyarakat menengah dan terutama menguntungkan bagi yang kaya yang jumlahnya sedikit.

**Tabel 4.12 Tabel GDP per kapita dan Tingkat Kemiskinan
Tahun 2004**

| Negara | Penduduk Miskin | GDP per kapita |
|---------------|------------------------|-----------------------|
| Jordan | 14,2 | 4.688 |
| Tunisia | 7,6 | 7.768 |
| Gambia | 57,6 | 1.991 |
| Mauritania | 46,3 | 1.940 |
| Senegal | 33,4 | 1.713 |
| Malaysia | 15,5 | 10.276 |
| Algeria | 22,6 | 6.603 |
| Guinea | 40 | 2.180 |
| Morocco | 19 | 4.309 |

| | | |
|--------------|------|-------|
| Cameroon | 40,2 | 2.174 |
| Niger | 63 | 779 |
| Yemen | 41,8 | 879 |
| Mali | 63,8 | 998 |
| Uganda | 37,7 | 1.478 |
| Burkina Faso | 46,6 | 1.169 |

Sumber : Human Development Report, 2006

Dari tabel diatas terlihat tidak adanya hubungan yang signifikan antara GDP per kapita dengan tingkat kemiskinan. Malaysia yang mempunyai GDP per kapita tertinggi yaitu \$ 10.276, memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi yaitu 15,5%, sedangkan Tunisi yang memiliki GDP perkapita lebih rendah dari Malaysia yaitu \$ 7.768 memiliki persentase penduduk miskin yang jauh lebih rendah dari Malaysia yaitu 7,6 %.

Yemen dan Mali dengan selisih GDP per kapiata yang kecil masing-masing \$879 dan \$998, memiliki perbedaan tingkat kemiskinan yang besar yaitu 41,8% untuk Yemen dan 63,8 untuk Mali.

Berdasarkan hasil estimasi juga diperoleh slope koefisien β_3 menunjukkan arah yang positif, maka hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara gini rasio dengan tingkat kemiskinan Koefisien slope yang didapat sebesar 0,269712, sehingga interpretasi dari koefisien slope tersebut adalah bila pertumbuhan gini rasio negara A lebih besar 1% dibandingkan negara B, maka akan menyebabkan jumlah penduduk miskin di negara A lebih banyak 0,269712% dibanding negara B.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Zulfachri (2006), dimana koefisien gini rasio positif (0,268) dan signifikan terhadap laju pertumbuhan kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh positif ketidakmerataan terhadap laju pertumbuhan kemiskinan. Dengan kenaikan ketidakmerataan akan menyebabkan bertambahnya laju pertumbuhan kemiskinan sebesar 0,268 satuan. Dengan demikian makin tinggi ketidakmerataan

pembangunan akan menyebabkan jumlah penduduk miskin terus meningkat secara nasional.

Pembangunan tidak hanya identik dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, diantaranya penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Menurut Sadeq (1995), indeks pembangunan ekonomi dalam Islam terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keadilan dalam distribusi pendapatan, dan nilai-nilai Islam. Dapat digambarkan dalam bentuk fungsi sebagai berikut :

$$D = f(G, E, V)$$

dimana :

D = Pembangunan Ekonomi

E = Keadilan dalam distribusi pendapatan

V = Nilai-nilai Islam

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi dibutuhkan agar ada usaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai pertumbuhan pendapatan dan kekayaan. Jadi menurut Sadeq dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan mengatasi masalah kemiskinan.

Masih menurut Sadeq, pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap kesejahteraan manusia, jika output dari pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi diantara sedikit orang.

Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketika diringi dengan keadilan dalam distribusi pendapatan. Karena salah satu prinsip fundamental dalam syariah adalah keadilan dalam distribusi pendapatan.

Pertumbuhan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi Islam.

Pertumbuhan ekonomi dijadikan prasyarat pertama untuk mengurangi kemiskinan., karena pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi yang selanjutnya berarti peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan riil yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pengurangan jumlah orang miskin.

Studi Ravallion dan Chen (1997) yang menggunakan data dari survei-survei rumah tangga dari 67 negara berkembang dan transisi selama periode 1981-1994, menunjukkan bahwa selalu kemiskinan mengalami penurunan mengikuti pertumbuhan pendapatan. Bukti serupa juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Roemer dan Gigerty (1997) yang juga menemukan bahwa suatu kenaikan dalam laju pertumbuhan PDB per kapita menghasilkan laju pertumbuhan yang sama dalam pendapatan rata-rata dari kelompok termiskin 40% dari populasi.

Tetapi jika pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat, pembangunan tersebut belumlah dapat dikatakan berhasil. Seperti yang diungkapkan Sadeq (1995) diatas, pertumbuhan ekonomi saja masih belum cukup. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan keadilan dalam distribusi pendapatan tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap pengurangan kemiskinan.

Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan disuatu negara, jika tingkat pendapatan nasionalnya rendah, maka kemelaratan juga akan semakin meluas.

Menurut Chapra (2008), dari sejumlah kajian empiris menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan dan ketidakadilan. Kajian semacam ini

membuktikan bahwa keadilan adalah syarat mutlak bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Keadilan tidak akan pernah terwujud melalui mekanisme *trickle-down effect*. Keadilan menempati posisi yang sangat penting karena kesejahteraan yang hakiki tidak dapat direalisasikan jika hasil dari pembangunan tidak didistribusikan secara merata kepada semua pihak. Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan harus menjadi perhatian, karena ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan memberikan beberapa dampak. Pertama, ketimpangan dalam distribusi pendapatan menyebabkan inefisiensi dalam ekonomi, diantaranya tingkat tabungan yang rendah dan alokasi aset yang tidak efisien. Kedua, disparitas pendapatan yang ekstrem melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Ketiga, ketimpangan yang ekstrem pada umumnya dipandang tidak adil.

c. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan proxi dari Variabel Negara (G)

Hasil output menunjukkan adanya hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dengan tingkat kemiskinan. Koefisien slope β_4 sebesar -1,290941 dan Koefisien slope β_5 sebesar -1,394215.

Interpretasi dari koefisien slope tersebut adalah bila pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan negara A lebih besar 1% dibandingkan negara B, maka akan menyebabkan jumlah penduduk miskin di negara A lebih rendah 1,290941 % dibanding negara B. Bila pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan negara A lebih besar 1% dibandingkan negara B, maka akan menyebabkan jumlah penduduk miskin di negara A lebih rendah 1,394215% dibanding negara B.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fan (2000), yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai dampak dalam pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian Chemingui (2007) juga menunjukkan bahwa pengeluaran publik di sektor pendidikan dan kesehatan ternyata mampu meningkatkan *Total Faktor Productivity* (TFP) untuk semua sektor. Perbaikan

dalam TFP akan mempengaruhi keseluruhan ekonomi, dan terutama dalam level kemiskinan.

Konsep tersebut sesuai dengan Islam. Salah satu tujuan negara Islam adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adalah dengan menyediakan barang dan jasa publik. Pada umumnya ada enam barang publik yang dapat disediakan pemerintah yaitu:

1. Bahan makan pokok
2. Makanan dan minuman untuk anak-anak sekolah
3. Pemeliharaan kesehatan
4. Pendidikan dan pelatihan
5. Transportasi dan komunikasi
6. Perumahan.

Sumber daya terpenting dari sebuah negara adalah manusianya. Dan, jika sebagian besar masyarakat sebuah negara tidak dapat menikmati taraf hidup yang layak karena kurangnya akses terhadap pendidikan atau pengaruh kekurangan gizi di masa kecil, negara tidak akan dapat memajukan potensi yang dimilikinya.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pada saat yang sama pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. (Todaro,2004).

Peningkatan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan. Pada saat yang sama, penyebab

paling penting dari kesehatan yang buruk di negara-negara berkembang adalah kemiskinan itu sendiri.

Kesehatan merupakan hal yang sentral dalam mengentaskan kemiskinan, karena masyarakat sering kurang mendapat informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan.

Negara yang tidak menginvestasikan uangnya pada pendidikan akan menemukan kesulitan untuk menarik investasi asing dalam dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja terdidik.

Orang yang berpendidikan akan memberi manfaat kepada orang-orang di lingkungannya. Pendidikan yang merupakan salah satu bentuk investasi dalam modal manusia dan sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik bagi keberhasilan ekonomi jangka panjang sebuah negara.

Pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi, pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Pendidikan berkontribusi langsung dalam pengentasan kemiskinan. Miriam David (PSIK,2007) merumuskan bahwa pendidikan adalah bagian penting dari pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan kemakmuran negara. Pendidikan menciptakan kemampuan orang perorang dan masyarakat mengakses sumber daya dan tata kebijakan dan mengorganisasikannya untuk menciptakan kemakmuran mereka sendiri.

Tugas negara adalah menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengembangan pendidikan. Karakter kebijakan negara dalam layanan pendidikan terbaca dari anggaran dan pengorganisasian (aspek institusional).

d. Variabel Human Development Indeks (Indeks Pembangunan Manusia/HDI) yang merupakan proxi dari Variabel Masyarakat (N)

Berdasarkan hasil estimasi model tersebut slope koefisien β_6 menunjukkan arah yang negatif, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara HDI dengan tingkat kemiskinan. Koefisien slope yang didapat sebesar -0,922351. Interpretasi dari koefisien slope tersebut adalah bila HDI negara A lebih besar 1% dibandingkan negara B, maka akan menyebabkan jumlah penduduk miskin di negara A lebih rendah 0,922351% dibanding negara B.s

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Brata (2004) dimana pembangunan manusia yang diproxxy dengan HDI memiliki hubungan negative dengan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian juga sejalan dengan hasil penelitian Mulyaningsih (2007), dimana koefisien HDI negatif (-1,227304) dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa engaruh IPM adalah negatif hal ini sesuai dengan hipotesis. Artinya ketika IPM naik sebesar satu satuan maka akan mengurangi kemiskinan sebesar 1,227304%, dimana faktor lain tetap.

Dari *Human Development Report*, diketahui bahwa hanya 5 negara muslim yang tergolong ke dalam kelompok Negara dengan nilai HDI yang tinggi, 31 negara memiliki nilai HDI pada kelompok menengah dan sisanya 21 negara tergolong ke dalam Negara dengan nilai HDI yang rendah.

Human development indeks bukanlah indeks yang komprehensif dalam mengukur pembangunan manusia. Indeks ini hanya memasukan tiga variabel saja yaitu harapan hidup, buta huruf dan GDP perkapita yang dinilai dengan keseimbangan daya beli. Masih ada variabel-variabel penting lain yang seharusnya dimasukkan kedalam model seperti keadilan, keluarga, dan masyarakat yang harmonis, jaminan kerja, dan keamanan lingkungan. Hal lain yang juga penting untuk dimasukkan kedalam indeks adalah demokrasi, kebebasan berekspresi, distribusi kekayaan dan kesejahteraan yang adil, dan sistem pengadilan yang baik.

Data untuk variabel-variabel tersebut mungkin tidak tersedia, meskipun demikian, hal ini penting untuk membuat indeks sekomprehensif mungkin dan meneruskan pemurniannya dengan alat yang tersedia. (Chapra,2008).

d. Variabel Konstitusi Negara yang merupakan proxi dari Variabel Syariah (S)

Koefisien konstitusi mempunyai nilai sebesar 0,116277 dengan koefisien slope lebih dari $\alpha=5\%$, yang artinya konstitusi tidak memiliki pengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di negara-negara muslim.

Pembangunan dalam Islam tidak dapat mengabaikan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan tempat hidup yang lebih baik dan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Nilai-nilai Islam memberikan kontribusi terhadap kemakmuran di dunia ini, dan nilai-nilai Islam mengandung rahmat Allah yang merupakan syarat penting dan secara positif berhubungan dengan kesejahteraan di akhirat.

Islam mendorong faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ke arah yang positif. Islam memberikan perhatian yang optimal kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu aspek penting dalam Islam adalah berusaha mengangkat derajat kaum lemah dan miskin.

Tetapi sayangnya saat ini nilai-nilai Islam banyak yang ditinggalkan. Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai hukum tertinggi, digantikan oleh hukum-hukum buatan manusia, padahal syariah akan dapat memainkan peranan yang bermakna jika syariah diimplementasikan secara adil dan tidak memihak.

Kaum muslimin saat ini menghadapi krisis yang menyeluruh, umat Islam mengalami kemunduran di berbagai sektor. Sekarang umat Islam sedang berada pada periode penguasa yang menindas (Hasan Al Bana,2000), dimana pada masa ini hukum Islam tidak lagi tegak.

Pemerintahan haruslah berlandaskan pada hukum Islam. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran (Al-Quaran 12:40; 3:145; 16:116) otoritas tertinggi ada pada Allah, dan hanya Allah sajalah yang berhak menciptakan hukum. (Maududi, 2007). Implementasi syariah tidak dapat diwujudkan jika pemerintah tidak bersedia menjalankan perannya dalam implementasi syariah.